

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER)

A. Pengertian LGBT

LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender*) telah menjadi fenomena global yang ramai dibahas dalam beberapa dekade terakhir. (Linklater, 2009) Hal ini dipicu oleh banyaknya pemberitaan atau informasi dari media maupun aktivitas dari para penganut LGBT yang *cross border*. Maraknya media-media yang juga memuat pemberitaan dan mengangkat fenomena yang sebenarnya adalah fenomena lama, kemudian membuat masyarakat kembali familiar dengan fenomena ataupun isu-isu LGBT. (Abigail, 2012)

Dalam ilmu hubungan internasional fenomena LGBT masuk kedalam satu isu global tentang hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia merupakan hal yang sangat sensitif untuk dibahas, namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui fenomena LGBT ini, apa itu lesbian, *gay* (Boelstorff, 2005), biseksual dan transgender. Sehingga mereka kerap mencampur adukkan istilah tersebut dengan pemahaman yang salah. Masyarakat luas bahkan kalangan mahasiswa sebagai masih memberikan stigma atau pandangan buruk terhadap orang-orang yang masuk dalam komunitas LGBT.

B. Sejarah LGBT

Pertama penulis akan membahas soal Lesbian, yang dimana termasuk salah satu bagian dari LGBT. Seperti yang kita ketahui bahwa lesbian adalah hasrat seksual antara wanita dengan wanita. Didalam sejarah lesbian masih sangat sedikit pembahasannya ketimbang homoseksual, mungkin bisa disebabkan karena pada abad pertengahan (1300-1500) yang lebih terfokus kepada hubungan seksual antara pria dengan pria, sehingga menyebabkan lesbian dianggap ilegal. (LGBT, 2016)

Pada tahun 1636 John Cotton mengusulkan undang-undang kepada Massachusetts Bay untuk membuat hubungan seksual antara wanita dengan wanita menjadi pelanggaran berat, namun usulan tersebut tidak jadi diberlakukan. Sekitar tahun 1655 daerah-daerah jajahan Inggris pun mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan hubungan seksual sejenis, baik antara pria maupun wanita. Namun akhirnya pun sama, tidak jadi diberlakukan.

Hingga akhirnya terjadi tindakan sodom yang dilakukan oleh Sarah White Norman kepada Mary Vincent Hammon, keduanya melakukan hubungan seksual yang dianggap sebagai perilaku tidak wajar. Sarah White Norman dinggap bersalah karena melakukan tindakan tersebut terhadap anak usia 16 tahun, dan menyebabkan dirinya dihukum serta diminta untuk mengakui secara terbuka bahwa keduanya telah melakukan perilaku tersebut. (LGBT, 2016)

a. Zaman Sejarah Kuno

Pada zaman sejarah kuno (1700 SM) kode Hammurabi secara luas dianggap sebagai penyebutan awal lesbian di dokumen sejarah yang masih ada sampai sekarang. Kode Hammurabi tersebut memuat referensi wanita yang disebut *salzikrum* (secara harfiah berarti: “anak laki-laki”), tetapi merupakan perempuan yang diizinkan untuk menikahi wanita lain. Kode ini juga berisi penyebutan awal kata transgender. (lgbt, 2016)

b. Zaman Yunani Kuno

Pada zaman Yunani kuno hubungan seksual antara sesama wanita hampir tidak disebutkan dalam setiap literturnya. Hal ini hanya dibahas secara singkat bersama heteroseksualitas dan homoseksualitas laki-laki yang disampaikan Aristoteles dalam pidatonya. (LGBT, 2016)

Dalam biografi Plutarch yang berjudul *Lycurgus* dari Sparta, penulis mengklaim bahwa Spartan perempuan yang sudah tua akan membentuk hubungan dengan gadis-gadis yang mirip dengan *erastes/eromenos* atau hubungan yang umum antara laki-laki Yunani baik yang sudah tua maupun yang masih muda.

c. Zaman Revolusi

1. Gerakan Homophile (1945-1969)

Setelah Perang Dunia II, sejumlah kelompok yang menuntut hak bagi homoseksual muncul atau dihidupkan kembali

di seluruh dunia Barat, di Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, negara-negara Skandinavia dan Amerika Serikat. Kelompok-kelompok ini biasanya lebih memilih istilah *homophile* untuk homoseksual, yang menekankan cinta seks.

Gerakan *homophile* dimulai pada akhir 1940-an dengan kelompok-kelompok di Belanda dan Denmark, dan berlanjut sepanjang tahun 1950an dan 1960an dengan kelompok-kelompok di Swedia, Norwegia, Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan tempat lain. ONE, Inc., organisasi homoseksual publik pertama di AS, didanai oleh pria transeksual kaya Reed Erickson. Jurnal hak transgender A.S., *Transvestia: Journal of the American Society for Equality in Dress*, juga menerbitkan dua isu pada tahun 1952.

Gerakan *homophile* melobi untuk membangun pengaruh yang menonjol dalam sistem politik penerimaan sosial. Pada tahun 1970an kemudian kelompok homofil diremehkan karena menjadi asimilasi. Setiap demonstrasi tertib dan sopan. (Matzner, 2004) Pada tahun 1969, ada puluhan organisasi dan publikasi *homophile* di A.S., (*"Before Stonewall: Activists for Gay and Lesbian Rights"*, 2005) dan sebuah organisasi nasional telah dibentuk, namun sebagian besar diabaikan oleh media. Sebuah pawai *gay* tahun 1962 yang diadakan di depan Independence Hall di Philadelphia, menurut beberapa sejarawan, menandai dimulainya gerakan hak *gay* modern.

Sementara itu, di San Francisco, organisasi pemuda LGBT Vanguard dibentuk oleh Adrian Ravarour untuk

menunjukkan kesetaraan, dan anggota Vanguard memprotes persamaan hak selama bulan April-Juli 1966, diikuti oleh kerusuhan Compton pada bulan Agustus 1966, di mana pelacur jalanan transgender di lingkungan miskin Tenderloin memberontak melawan pelecehan polisi di restoran populer sepanjang malam, Kantin Gene Compton.

Laporan Wolfenden diterbitkan di Inggris pada tanggal 4 September 1957 setelah mengumumkan alasan homoseksualitas pria terkenal, termasuk Lord Montagu. Mengabaikan gagasan konvensional pada hari itu, panitia merekomendasikan bahwa "perilaku homoseksual antara orang dewasa yang menyetujui secara pribadi seharusnya tidak lagi menjadi tindak pidana". Semua kecuali James Adair mendukung hal ini dan, bertentangan dengan beberapa bukti saksi medis dan psikiatri saat itu, menemukan bahwa "homoseksualitas tidak dapat dianggap sah sebagai penyakit, karena dalam banyak kasus ini adalah satu-satunya gejala dan kompatibel dengan yang lengkap. kesehatan mental dalam hal lain."

Laporan tersebut menambahkan, "Fungsi hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan kesopanan, untuk melindungi warga negara dari tindakan yang menyinggung atau merugikan, dan untuk menyediakan perlindungan yang memadai terhadap eksploitasi dan korupsi orang lain. Bukannya, menurut pandangan kita, fungsi dari hukum untuk campur tangan dalam kehidupan

pribadi warga negara, atau berusaha menerapkan pola perilaku tertentu. "

Laporan tersebut akhirnya mengarah pada pengenalan UU Pelanggaran Seksual 1967 yang didukung oleh anggota parlemen Buruh Roy Jenkins, yang kemudian menjadi Sekretaris Rumah Tangga Tenaga Kerja. Ketika diloloskan, Undang-undang Pelecehan Seksual mendekriminalisasi tindakan homoseksual antara dua pria di atas 21 tahun secara pribadi di Inggris dan Wales. (The Guardian, 2010)

Aktivis biseksual menjadi lebih terlihat menjelang akhir tahun 1960an di Amerika Serikat. Pada tahun 1966, aktivis biseksual Robert A. Martin (a..a. Donny the Punk) mendirikan Student Homophile League di Columbia University dan New York University. Pada tahun 1967 Universitas Columbia secara resmi mengenali kelompok ini, sehingga menjadikan mereka perguruan tinggi pertama di Amerika Serikat untuk secara resmi mengenali kelompok siswa *gay*. Aktivisme atas nama biseksual pada khususnya juga mulai tumbuh, terutama di San Francisco.

Salah satu organisasi paling awal untuk biseksual, Liga Kebebasan Seksual di San Francisco, difasilitasi oleh Margo Rila dan Frank Esposito yang dimulai pada tahun 1967. (Altman, 1971) Dua tahun kemudian, saat pertemuan staf di fasilitas kesehatan mental San Francisco yang melayani orang-orang LGBT, perawat Maggi Rubenstein keluar sebagai biseksual.

Karena ini, biseksual mulai dimasukkan ke dalam program fasilitas untuk pertama kalinya. (Adam, 1987)

Awal mula istilah yang digunakan mengenai masalah orientasi seksual adalah homoseksual, istilah ini berkembang pada abad IX Masehi. (Gunderloy, 1989) Sebelum “Revolusi Seksual” pada tahun 1960-an. Belum ada kata homoseksual, lesbian, *gay*, dan transgender sebelum revolusi seksual terbentuk, melainkan “gender ketiga” yang muncul pada tahun 1860-an. Revolusi seksual pada tahun 1960 digunakan untuk menggambarkan perubahan sosial politik mengenai seksualitas.

Diawali dengan isu homofilia pada era 1950-an dan 1960-an. Lalu berganti kembali pada tahun 1970-an menjadi *gay*. Pada masa yang sama juga terjadi perubahan pada pengelompokan istilah *gay* menjadi lebih umum dikarenakan identitas lesbian semakin terbentuk. (Kennedy, 1980) Terangkatnya isu feminisme juga membuat para kaum lesbian tidak ingin bekerja sama dengan kaum *gay*. (LGBT, 2016)

Terangkatnya isu feminisme juga membuat para kaum lesbian tidak ingin bekerjasama dengan kaum *gay*. (LGBT, 2016) Kaum LGBT di hampir seluruh Eropa secara tegas menuntut kesamaan hak dengan warga negara lainnya tanpa membedakan orientasi seksualnya. Di Amsterdam, pada tanggal 4 Mei 1970 aksi kelompok *gay* muda Amsterdam atau *Amsterdamse Jongeren Actiegroep Homoseksualiteit* melakukan aksi

peringatan nasional untuk para korban meninggal akibat kekerasan yang dialami korban homoseksual.

Biseksual menjadi lebih terlihat dalam gerakan hak LGBT di tahun 1970an. Pada tahun 1972 sebuah kelompok Quaker, Komite *Friends on Bisexuality*, mengeluarkan "Pernyataan Ithaca tentang Biseksualitas" yang mendukung biseksual. (BiMedia.org", 2015)

Pernyataan tersebut, yang mungkin merupakan "pernyataan publik pertama tentang gerakan biseksual" dan "tentu merupakan pernyataan pertama tentang biseksualitas yang dikeluarkan oleh majelis religius Amerika," muncul di Jurnal Teman *Quaker* dan *The Advocate* pada tahun 1972. (Donaldson, 1995) ("Quakers 'come out' at conference". *The Advocate*, 1972)

Pada tahun yang sama Kelompok Pembebasan Biseksual Nasional dibentuk di New York. Pada tahun 1976 San Francisco Bisexual Center dibuka. Dari gerakan Pembebasan *Gay* anarkis pada awal 1970an muncul gerakan Hak Asasi Manusia yang reformis dan isu tunggal yang menggambarkan kaum *gay* dan lesbian sebagai kelompok minoritas dan menggunakan bahasa hak-hak sipil dalam banyak hal melanjutkan pekerjaan periode *homophile*. (Epstein, 1999) Di Berlin, misalnya, *Homoseksuele Aktion Westberlin radikal terhalang oleh Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft*. (Leftist Sexual Politics and Homosexuality:, 1995)

Pembela hak *gay* dan lesbian berpendapat bahwa orientasi seksual seseorang tidak mencerminkan jenis kelamin seseorang; Artinya, "Anda bisa menjadi pria dan menginginkan pria tanpa implikasi identitas gender Anda sebagai pria," dan hal yang sama juga terjadi jika Anda wanita. (The Category 'Transgender' in the Construction of Contemporary U.S. American Conceptions of Gender and Sexuality", 2000) *Gay* dan lesbian disajikan identik dengan heteroseksual dalam segala hal kecuali praktik seksual pribadi, dan *butch "bar dykes"* dan ratu jalanan yang flamboyan dilihat sebagai stereotip negatif lesbian dan *gay*. Aktivis veteran seperti Sylvia Rivera dan Beth Elliot dikesampingkan atau diusir karena mereka transgender.

Pada tahun 1974, Maureen Colquhoun keluar sebagai anggota parlemen lesbian pertama untuk Partai Buruh di Inggris. Ketika terpilih dia menikah dalam pernikahan heteroseksual.

Pada tahun 1975, film terobosan yang menggambarkan homoseksual *gay* ikon hidup Quentin Crisp, *The Naked Civil Servant* ditransmisikan oleh Thames Television untuk saluran televisi Inggris ITV. Jurnal Inggris *Gay Left* juga mulai dipublikasikan. Setelah British Home Stores memecat seorang pelatih *gay* Tony Whitehead, sebuah kampanye nasional kemudian memilih tempat mereka sebagai protes.

Pada tahun 1977, Harvey Milk terpilih ke Dewan Pengawas San Francisco menjadi pria *gay* pertama yang terbuka di Amerika Serikat yang terpilih menjadi pegawai negeri. Dia

dibunuh oleh seorang mantan pengawas kota Dan White pada tahun 1978.

Pada tahun 1977, mantan kontestan Miss America dan juru bicara jus jeruk, Anita Bryant, memulai sebuah kampanye "*Save Our Children*" di Dade County, Florida (Miami yang lebih besar), yang terbukti menjadi latar belakang utama gerakan Pembebasan *Gay*. Pada dasarnya, dia mendirikan sebuah organisasi yang mengajukan amandemen undang-undang negara yang mengakibatkan penembakan banyak guru sekolah umum karena kecurigaan bahwa mereka homoseksual.

Pada tahun 1979, sejumlah orang di Swedia memanggil orang sakit dengan kasus homoseksual, sebagai protes terhadap homoseksualitas yang diklasifikasikan sebagai penyakit. Ini diikuti oleh pendudukan aktivis dari kantor utama Dewan Kesehatan dan Kesejahteraan Nasional. Dalam beberapa bulan, Swedia menjadi negara pertama di dunia yang menghapus homoseksualitas sebagai penyakit.

Feminis lesbian, yang paling berpengaruh sejak pertengahan 1970-an sampai pertengahan 1980-an, mendorong wanita untuk mengarahkan energinya ke wanita lain daripada pria, dan menganjurkan lesbianisme sebagai hasil logis dari feminisme. (*Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, 1980*) Seperti Pembebasan *Gay*, pemahaman tentang potensi lesbian di semua wanita bertentangan dengan kerangka hak minoritas gerakan Hak Asasi Manusia. Banyak perempuan

gerakan Pembebasan *Gay* merasa frustrasi pada dominasi gerakan oleh laki-laki dan membentuk organisasi yang terpisah; Beberapa yang merasa perbedaan gender antara pria dan wanita tidak dapat dipecahkan mengembangkan "separatisme lesbian," dipengaruhi oleh tulisan-tulisan seperti buku *Lesbian Nation* karya Jill Johnston tahun 1973.

Penyelenggara pada saat itu fokus pada masalah ini. Diane Felix, juga dikenal sebagai DJ Chili D di adegan klub Bay Area, adalah seorang lesbian Amerika Latin yang pernah bergabung dengan organisasi aneh Gino Latino Amerika. Dia dikenal karena menciptakan ruang hiburan khusus untuk wanita aneh, terutama di komunitas Amerika Latin. Tempat-tempat ini termasuk bar *gay* di San Francisco seperti *A Little More and Colors*. (Cassell) Ketidaksepakatan antara berbagai filsafat politik kadang-kadang sangat memanas dan dikenal sebagai perang seks lesbian, khususnya pada pandangan tentang sadomasokisme, pelacuran, dan transeksual. Istilah "*gay*" menjadi lebih kuat dikaitkan dengan laki-laki homoseksual.

Pada bulan Mei 1979, sebuah organisasi lesbian pertama yang didirikan di Amsterdam, Belanda yang bernama *Center for Culture* mencetuskan sebuah ide untuk mendirikan monumen peringatan bagi kaum homoseksual dari *The Gay Group of The Pasifist Socialist Party*. Dari ide ini mereka mendapatkan banyak dukungan, baik kelompok maupun individu yang terdiri dari 7152 grup *gay*, lesbian, dan dukungan dari dunia internasional.

Sementara lesbian yang lebih berpandangan esensial merasa bahwa pendapat feminis yang separatis dapat merugikan hak-hak kaum *gay*. Lalu muncul sebuah gerakan yang berasal dari para paham feminisme, yaitu gerakan *free love* yang juga berusaha memperjuangkan hak para kaum homoseksual. (Esterberg, 1994) Hampir seluruh negara di Eropa dan Amerika akhirnya melahirkan tokoh reformis yang ikut memperjuangkan hak para kaum homoseksual, lesbian dan kehidupan yang bebas.

Pada masa ini terjadi *Gay Liberation Movement* di Stonewell In, Greenwich Village. dimana gerakan ini menuai keributan antara pendemo dan pihak berwajib yang tengah memperjuangkan kebebasan para penganut *gay*. Peristiwa ini tercatat sebagai sejarah di Amerika Serikat karena sebagai pemicu gerakan perjuangan hak asasi para penganut *gay*, yang kemudian menghasilkan komunitas-komunitas *gay* baru, seperti *Gay Liberation Front* (GLF), *The Gay Activists' Alliance* (GAA), dan *Front Homosexual d'Action Revolutionnaire*.

Pada tahun 1970 para aktivis LGBT melakukan protes kepada *American Psychiatric Association* (APA) karena membuat keputusan bahwa homoseksual merupakan bagian dari penyakit mental gangguan jiwa. Hal tersebut tertuang dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. Banyaknya aktivis LGBT yang protes karena tidak setuju tentang hal tersebut. Lalu pada tahun 1974 APA secara resmi menghapus homoseksual dari masalah mental gangguan jiwa *disorders*. Tindakan ini kemudian

disebarluaskan kepada hampir semua asosiasi psikiatri di seluruh penjuru dunia.

Setelah itu, muncul kecaman perbedaan dalam pekerjaan yang menyangkut identitas gender, dimana hal ini menciptakan gerakan yang memperjuangkan hak asasi kaum *gay* (*Gay Rights Movement*). Pada tahun 1978, dibentuk *International Lesbian and Gay Association* (ILGA), dimana asosiasi ini merupakan sebuah institusi yang memperjuangkan hak-hak asasi kaum lesbian dan *gay*. Dan pada masa ini pula, diperkenalkan simbol yang digunakan oleh kaum LGBT yaitu bendera pelangi yang sekarang telah tersebar luas ke seluruh dunia sebagai pedoman dan lambang kaum LGBT untuk meraih hak-hak asasinya. (Igbt, 2016)

Gerakan hak asasi untuk mendukung kaum *gay* mulai berjalan pada tahun 1980 dalam rangka memperjuangkan hak atas tidak adanya keterkaitan kaum *gay* dengan penyakit menular AIDS. AIDS mulai muncul sekitar tahun 1980-an, penyakit ini pertama kali ditemukan oleh seorang pria dikalangan *gay* di kota-kota besar di Amerika Serikat. HIV adalah salah satu penyebab utama munculnya penyakit AIDS yang disebabkan oleh hubungan anal yang dilakukan antara pria. Pada tanggal 17 Mei 1980 gerakan pendukung kaum *gay* ini didukung oleh *World Health Organization* dengan menghapus list kaum homoseksual dari *International Classification Diseases*.

Di Kanada, berlakunya Bagian 15 dari Piagam Hak dan Kebebasan Kanada pada tahun 1985 melihat adanya pergeseran dalam gerakan hak *gay* di Kanada, karena para *gay* dan lesbian. Kanada beralih dari pembebasan ke strategi yang legal. Ditujukan pada perlindungan Piagam dan atas gagasan tentang kekekalan homoseksualitas, keputusan pengadilan dengan hak maju yang cepat, termasuk peraturan yang memaksa pemerintah Kanada untuk melegalkan pernikahan sesama jenis.

Telah diperdebatkan bahwa walaupun strategi ini sangat efektif dalam memajukan keselamatan, martabat dan kesetaraan kaum homoseksual Kanada, penekanannya terhadap kesamaan datang dengan mengorbankan perbedaan dan mungkin telah merusak kesempatan untuk perubahan yang lebih berarti. (Lehman, 2005)

Kemunduran lain di Amerika Serikat terjadi pada tahun 1986, ketika Mahkamah Agung AS menegakkan hukum anti-sodomi Georgia dalam kasus *Bowers v. Hardwick*. (Keputusan ini akan dibatalkan dua dekade kemudian di *Lawrence v. Texas*).

2. Gerakan Pembebasan Gay (1969-1974)

American Psychiatric Association menghapus "homoseksualitas" dari manual diagnostik penyakit jiwa pada tahun 1973.

Aktivis kesetaraan *Gay Barbara Gittings* memecat Independence Hall pada 1965. Gerakan sosial baru tahun enam puluhan, seperti gerakan perang *Black Power* dan anti-Vietnam di

AS, pemberontakan Mei 1968 di Prancis, dan Pembebasan Wanita di seluruh dunia Barat, mengilhami banyak aktivis LGBT untuk menjadi lebih radikal, ("*Before Stonewall: Activists for Gay and Lesbian Rights*", 2005) dan gerakan Pembebasan Gay muncul menjelang akhir dekade ini. Radikalisme baru ini sering dikaitkan dengan kerusuhan Stonewall pada tahun 1969, ketika sekelompok pria gay, lesbian, dan ratu drag di sebuah bar di New York menolak sebuah serangan polisi. (Bullough, 2005)

Setelah Stonewall, kelompok seperti Front Pembebasan Gay (*Gay Liberation Front / GLF*) dan Aliansi Aktivis Gay (GAA) dibentuk. Penggunaan *gay* kata-kata tersebut merupakan penolakan baru yang tidak menyenangkan - sebagai antonim untuk "perilaku seksual terhormat" yang lurus, mencakup berbagai jenis seksualitas dan ekspresi gender non-normatif, termasuk pelacur jalanan transgender, dan akhirnya berusaha untuk membebaskan biseksual. potensi di semua orang, rendering usang kategori homoseksual dan heteroseksual. (Altman, 1971) (Adam, 1987).

Menurut penulis *Gay Lib* Toby Marotta, "pandangan politik *Gay* mereka bukanlah homofil tapi liberasionis". (Marotta) "Keluar, keras dan sombong," mereka bertunangan dengan teater jalanan berwarna-warni. (Gallagher) "*Manifesto Gay Gay*" GLF menetapkan tujuan untuk gerakan pembebasan *gay* yang masih muda, dan intelektual berpengaruh Paul Goodman menerbitkan "*The Politics Being Queer*" (1969). Bab GLF didirikan di seluruh

A.S. dan di bagian lain dunia Barat. *Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire* dibentuk pada tahun 1971 oleh lesbian yang berpisah dari *the Mouvement Homophile de France*.

Aktivis biseksual Brenda Howard dikenal sebagai "Ibu Kebanggaan" atas karyanya dalam mengkoordinasikan pawai kebanggaan LGBT yang pertama; pawai tersebut akhirnya terjadi di New York pada tahun 1970. Howard juga memulai gagasan untuk serangkaian acara selama seminggu di seputar Hari Kebanggaan yang menjadi awal perayaan Prestawi LGBT tahunan yang sekarang diadakan di seluruh dunia setiap bulan Juni. (Belonsky, 2007)

Selain itu, Howard bersama dengan aktivis biseksual Robert A. Martin (a... Donick of the Punk) dan L. Craig Schoonmaker dikreditkan dengan mempopulerkan kata "Pride" untuk menggambarkan perayaan ini. (Dynes, 2011) Seperti yang dikatakan oleh aktivis biseksual Tom Limoncelli, "Lain kali seseorang bertanya kepada Anda mengapa pawai LGBT Pride ada atau mengapa Bulan Pride LGBT adalah bulan Juni, katakan kepada mereka 'Seorang wanita biseksual bernama Brenda Howard kira seharusnya begitu.'"

Salah satu nilai dari gerakan itu adalah kebanggaan *gay*. Dalam beberapa minggu setelah Kerusuhan Stonewall, Craig Rodwell, pemilik Toko Buku Memorial Oscar Wilde di Manhattan bagian bawah, membujuk *Eastern Regional Homophile Organizations* (ERCHO) untuk menggantikan

Pengingat Tahunan Keempat Juli di Aula Kemerdekaan di Philadelphia dengan peringatan pertama Kerusuhan Stonewall. Kelompok pembebasan, termasuk Front Pembebasan *Gay*, Queens, Aliansi Aktivis *Gay*, *Radicalesbians*, dan *Street Revolutionial Action Revolusioner* (STAR) semuanya ambil bagian dalam Pekan Kebanggaan *Gay* yang pertama. Los Angeles mengadakan parade besar pada Hari Kebanggaan *Gay* pertama. Demonstrasi yang lebih kecil diadakan di San Francisco, Chicago, dan Boston.

Di Inggris, GLF mengadakan pertemuannya di ruang bawah tanah London School of Economics pada tanggal 13 Oktober 1970. Bob Mellors dan Aubrey Walter telah melihat efek GLF di Amerika Serikat dan menciptakan sebuah gerakan paralel yang didasarkan pada politik revolusioner dan gaya hidup alternatif.

Pada tahun 1971, GLF Inggris diakui sebagai gerakan politik di media nasional, mengadakan pertemuan mingguan 200 sampai 300 orang. (Brittain, 1971) Manifesto GLF diterbitkan, dan serangkaian tindakan langsung profil tinggi dilakukan. ((GLF)"., 2009)

Gangguan pembukaan Festival Cahaya 1971 adalah tindakan GLF terorganisir terbaik. Festival Cahaya, yang tokoh utamanya termasuk Mary Whitehouse, bertemu di Methodist Central Hall. Kelompok anggota GLF dalam serang diserang dan saling mencium secara spontan; yang lain melepaskan tikus,

klakson yang dibunyikan, dan memasang spanduk, dan sebuah kontingen berpakaian saat pekerja memperoleh akses ke ruang bawah tanah dan mematikan lampu.

Pada tahun 1971 gerakan pembebasan *gay* di Jerman, Austria dan Swiss dimulai dengan film *Rosa von Praunheims It Is Not the Homoseksual Who is Pervers, But the Society in Which He Lives*.

Paska 1972 melihat konferensi tahunan *Gay Lib* yang diadakan di gedung Persatuan Mahasiswa Sepak Bola (University of Birmingham) di University of Birmingham. (*Gay Liberation Front annual conference in 1972, 2012*)

Pada tahun 1974, perselisihan internal telah menyebabkan percabulan gerakan tersebut. Organisasi yang bergerak keluar dari gerakan tersebut termasuk London Lesbian and *Gay Switchboard*, *Gay News*, dan *Icebreaker*. Layanan Informasi GLF (*Gay Liberation Front*) berlanjut selama beberapa tahun lagi untuk menyediakan sumber daya terkait *gay*. Cabang GLF telah didirikan di beberapa kota Inggris provinsi (misalnya, Bradford, Bristol, Leeds, dan Leicester) dan beberapa lainnya bertahan beberapa tahun lebih lama. Kelompok Leicester yang didirikan oleh Jeff Martin terkenal karena keterlibatannya dalam pembentukan "*Gayline*" setempat, yang saat ini masih aktif dan telah menerima dana dari National Lottery. Mereka juga melakukan kampanye dengan profil tinggi melawan koran lokal,

Leicester Mercury, yang menolak untuk mengiklankan layanan *Gayline* pada saat itu. (News, 1978)

Dari tahun 1970 aktivis memprotes klasifikasi homoseksualitas sebagai penyakit jiwa oleh *American Psychiatric Association* dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental mereka, dan pada tahun 1974 diganti dengan kategori "gangguan orientasi seksual" kemudian "homoseksualitas *ego-dystonic*," yang juga dihapus, meskipun "gangguan identitas gender" (istilah yang digunakan untuk disforia Gender) tetap ada.

Pada tahun 1972, Swedia menjadi negara pertama di dunia yang mengizinkan orang-orang yang transeksual dengan undang-undang untuk mengubah jenis kelamin mereka dan memberikan terapi penggantian hormon gratis. Swedia juga mengizinkan usia persetujuan untuk pasangan sesama jenis pada usia 15 tahun, sehingga setara dengan pasangan heteroseksual. ("Lagen om könsbyte ska utredas", 2007)

Di Jepang, kelompok LGBT didirikan pada 1970-an. ((GLF)"., 2009) Pada tahun 1971, Ken Togo mencalonkan diri untuk pemilihan Majelis Tinggi.

d. Zaman Modern

Istilah LGBT sendiri mulai digunakan pada sekitar tahun 1990 hingga sekarang untuk menggantikan frasa para penganut *gay*, karena istilah LGBT dapat mencakup semua jenis orientasi seksual tidak hanya untuk *gay* saja. Perubahan orientasi seksual ini merupakan awal lahirnya pemikiran Teresa de Lauretis yaitu

queer theory. Teori queer memiliki definisi bahwa identitas itu tidak bersifat tetap dan stabil. (Ardhanaryinstitute, 2015)

Secara sosial identitas bersifat historis dan dikonstruksi, yang berarti bahwa secara teori dapat dikategorikan sebagai anti identitas, anti kategori dan anti normatif. Inti dari teori ini adalah berfokus pada proses adanya pergerakan yang melewati ide, hubungan, ekspresi, ruang dan keinginan yang menginovasi perbedaan cara hidup di dunia. (Theory.Org.UK, 2007)

“This idea of identity as free-floating, as not connected to an 'essence', but instead a performance, is one of the key ideas in queer theory. Seen in this way, our identities, gendered and otherwise, do not express some authentic inner "core" self but are the dramatic effect (rather than the cause) of our performances.”

Teori queer kemudian dikembangkan oleh Judith Butler yang mengatakan bahwa konstruksi gender dan seksualitas mengalami fluktuasi, mengembangkan produksi atau penampilan daripada kategori yang mendasar stabil dan tetap. (Butler, *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”*, 1993)

Teori queer disini dibuat untuk mengacaukan kategori-kategori identitas yang sudah ada, mengeluarkan definisi tentang *gay* dan lesbian dari kotak kaku dalam mendefinisikan gender dan seksualitasnya. (Butler, *Gender Trouble*, 1990) Teori queer juga mencoba membuat kategori identitas dan seksualitas agar menjadi

konstruksi sosial yang diciptakan dalam wacana daripada kategori yang bersifat esensial dan biologis.

Pada awalnya queer teori hanya memusatkan pada perjuangan untuk perlindungan terhadap kaum lesbian dan *gay*. Namun kini queer teori telah merambah kepada *perormance*, yaitu kekacauan cara berpakaian atau penampilan seseorang dalam rangka mengaburkan norma-norma gender dalam upaya pemberitahuan bahwa gender dan seks bukanlah sesuatu yang pasti dan alamiah. (Butler, Gender Trouble, 1990)

Seperti yang disebutkan diatas, seorang individu adalah aktor dalam kehidupan. Oleh karenanya untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi LGBT yang pertama kali dilakukan adalah menghapus gagasan dasar dari aturan *male-masculine* dan *female-feminine*. Maka jika ditinjau dari queer teori, LGBT bukanlah suatu penyimpangan sosial, melainkan suatu variasi dalam identitas manusia yang didasarkan pada tindakan performatif. (Butler, Gender Trouble, 1990)

C. Sejarah LGBT Di Indonesia

LGBT di Indonesia sendiri setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada juga yang menyebut sudah ada sejak 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebut fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar dekade 1960-an. Lalu, LGBT berkembang pada dekade 1980-an, 1990-an, dan meledak pada era 2.000-an hingga sekarang. (Abigail, 2012)

a. Awal Mula LGBT di Indonesia

Jadi, secara kronologis dan sejarahnya, perkembangan LGBT ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an. Kalau dulu terkenal Sentul dan Kantil, kini sebutannya adalah *Buci* dan *Femme*. (Akbar, 2016)

LGBT itu sebenarnya sudah ada di Indonesia hanya saja tidak disebut bahwa itu adalah LGBT, jadi di Makassar itu sebenarnya mereka mengenal 5 jenis gender, ada laki-laki, ada perempuan, calalai, calabai, dan bisu. Calalai dan calabai ini merupakan transgender, jadi calalai ini yang merupakan laki-laki tapi berdandan seperti perempuan, sementara calabai perempuan berdandan seperti laki-laki, dan bisu itu sendiri bisa jadi calalai ataupun calabai, tapi dia yang memiliki kedudukan tertinggi, bisu memiliki kekuatan khusus dan terpilih secara khusus juga, seperti mendapatkan wangsit.

Bisu ini dulunya dibeberapa daerah masyarakat Makassar itu memiliki kedudukan yang tinggi karena mereka merupakan perantara antara manusia, alam dan kekuatan Yang Maha Esa, bisu juga merupakan tangan kanan para pemimpin daerah. Masyarakat disana lebih mengerti calalai, calabai dan bisu ketimbang lesbian, *gay*, transgender.

Calalai dan calabai pun memiliki kedudukan yang sama pentingnya, mereka inilah yang membesarkan anak orang-orang penting didaerah tersebut.

Namun pada saat Islam masuk praktik tersebut masih berjalan, kemudian dalam orde baru praktik itu berusaha untuk dimusnahkan sehingga peran bisu, calalai dan calabai tergantikan oleh tokoh agama, baby sitter, hingga akhirnya mereka mendapatkan diskriminasi, seperti dibuang, diasingkan dari masyarakat. Pada masa reformasi mereka mendapatkan perannya kembali namun dengan kedudukan yang tinggi lagi seperti dahulu.

Di daerah Jawa Timur juga ada praktik seperti itu, disana dikenal dengan sebutan gemblak yang merupakan pasangan dari warog. Dalam kisahnya warog sendiri merupakan salah satu penari dalam seni reog, warog berperan sebagai pengawal/punggawa Raja Klana Sewandana. Warog sendiri memiliki istri dan anak.

Pada zaman dahulu warog dipercaya supaya kekuatan yang dimiliki tetap bertahan maka warog harus melakukan hubungan seksual dengan gemblak yang notabennya gemblak ini adalah laki-laki. Namun tidak seterusnya atau selamanya mereka menjadi pasangan. Jadi gemblak ini ada untuk menjaga kekuatannya warog sehingga warog harus bertanggungjawab terhadap hidup gemblak.

Pada waktu orde baru praktik-praktik seperti ini juga dihapuskan. Walau sudah dilarang namun sebenarnya diam-diam mereka yang tetap melakukan kegiatan tersebut. Belum dapat

dipastikan juga apakah mereka LSL atau *Gay*. *Gay* = jika ada rasa suka, LSL = hanya melakukan kegiatan seks.

b. Awal Mula Organisasi dan Advokasi LGBT di Indonesia

Munculnya organisasi dan advokasi LGBT di Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi seperti Himpunan Wadam Jakarta (HIWAD) dan Wanita Adam (WADAM). Organisasi WIMAD ini mendapat protes dari MUI. (Abraham, 2010)

Kemudian pada tahun 1982, penganut homoseksual di Indonesia mendirikan Lambda Indonesia dan pada tahun 1986 berdiri Persatuan Lesbian Indonesia. Pada tahun yang sama, berdiri juga kelompok kerja Lesbian dan *Gay* Nusantara (GAYa Nusantara).

Era 1990-an semakin banyak organisasi LGBT yang berdiri. Organisasi yang berkedok emansipasi, khususnya emansipasi wanita. Mereka juga membangun media sebagai sarana publikasi. Ada beberapa media yang didirikan sebagai wadah komunikasi antar LGBT. (Abigail, 2012) Era 1990-an pergerakan LGBT di Indonesia bergerak dengan luar biasa karena adanya dukungan dari organisasi sekutu mereka: seperti organisasi feminis, dukungan dari organisasi kesehatan dan seksual, organisasi layanan HIV, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. (Akbar, 2016)

Mereka ini membantu dengan cara memberi dukungan dan memberi ruang untuk bergerak, bahkan untuk membuat

sejumlah kegiatan. Namun kegiatan-kegiatan tersebut sering disamarkan sebagai penyuluhan bagi kalangan muda.

Pada tahun 1993, dihelat Kongres Lesbian dan *Gay* (KLG I), di Yogyakarta. Dua tahun berikutnya, digelar kongres serupa. Pada tahun 1995, Kongres Lesbian dan *Gay* yang kedua (KLG II) diadakan di Bandung, dan pada tahun 1997 KLG III diselenggarakan di Bali. Organisasi LGBT mulai menyeruak ke sejumlah daerah penjurur Indonesia, di antaranya Ambon, Medan, dan Surabaya. Namun, pendataan jumlah penganutnya masih minim.

Tidak hanya organisasi dan perhelatan kongres, mereka juga menggelar pesta akbar. Pada saat itu sangat terkenal istilah “September Ceria” pada tahun 1990-an. Ini adalah pesta masif para penganut LGBT yang digelar pada malam minggu pertama setiap bulan September. (Akbar, 2016)

Pada tahun 1998, sudah memasuki era reformasi, LGBT mendapatkan momentumnya. Organisasi-organisasi LGBT semakin berani untuk menyuarakan suaranya. Berdasarkan data dari dialog laporan yang bertajuk “hidup sebagai LGBT di Asia” terdapat beberapa kongres lanjutan tingkat internasional.

Perkembangan yang drastis organisasi-organisasi LGBT di Indonesia memanfaatkan gejolak yang tengah terjadi pada sistem politik dan pemerintahan untuk terus melebarkan sayapnya.

1. Pada perhelatan Kongres Perempuan Indonesia yang diadakan pada bulan Desember tahun 1998 untuk pertama kalinya secara resmi mengikutsertakan perwakilan dari kaum wanita biseksual, lesbian, dan pria transgender (LBT). Meskipun ada di beberapa provinsi merasa keberatan dengan keputusan mengikutsertakan penganut wanita biseksual dan pria transgender. Dalam kongres tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia menuntut keadilan dan demokrasi yang utuh, dan mereka secara tegas resmi termasuk sektor XV.

2. Pendekatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi LGBT berbasis hak asasi manusia sehingga membuat program yang dijalankan dapat terlihat hasilnya. Hal ini tentu akan membuka peluang kerjasama antara organisasi-organisasi regional dengan organisasi-organisasi di pusat dan internasional.

3. Di saat yang bersamaan media massa mengangkat isu AIDS dan HIV yang membuat visibilitas permasalahan bagi penganut *gay* dan waria meningkat. Situasi ini membuat *ad hoc* memberikan tanggapan dengan menyelenggarakan beberapa program yang sistematis, strategis, dan didanai secara memadai.

4. Pada Januari 2008 enam organisasi LGBT yang berada di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta memutuskan untuk bergabung dalam rangka memperkuat gerakan mereka. Langkah ini menjadi awal Forum LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex & Queer*) Indonesia.

c. Komunitas LGBT di Indonesia

Komunitas *gay* pertama yang muncul di Indonesia bernama organisasi *gay* terbuka. Setelah itu banyak pula muncul organisasi-organisasi lainnya, seperti: GAYa Nusantara (GN) yang ada di Surabaya, Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan *Indonesia Gay Society* (IGS). (Plush.or.id, 2009) Dan muncul komunitas baru yang bernama HIMAG atau “Himpunan Mahasiswa Gay”.

HIMAG muncul pertama kali di universitas negeri terbesar di Yogyakarta pada tahun 2011. Setelahnya disusul setahun kemudian muncul di universitas negeri lainnya di Yogyakarta pada tahun 2012. HIMAG memiliki anggota yang anggotanya tersebar diberbagai fakultas dan jurusan. (www.kompasiana.com, 2011)

HIMAG menyediakan sarana dan prasarana bagi para penganut LGBT untuk dapat menumpahkan segala keluh kesahnya, bahkan untuk mencari pasangan yang senasib dengan mereka. Organisasi-organisasi ini memfasilitasi, menaungi, menampung segala sesuatu yang berkaitan dengan orientasi seksualitas. Kebanyakan organisasi yang berdiri merupakan atas dasar pemikiran para penganut LGBT untuk dapat terus memperjuangkan haknya. (Anonim, 2012).

Organisasi-organisasi tersebut biasanya memiliki partner, jaringan, donatur sendiri dan menjadi anggota dari salah satu organisasi internasional dalam bidang yang sama. Seperti GAYa

Nusantara yang merupakan anggota dari beberapa organisasi, seperti: *Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Society* (CSBR), *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* (ILGA), *Asia Pacific Coalition on Male Health* (APCOM), Arus Pelangi, Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA). Jaringan seperti: *Human Rights Watch*, *International AIDS Candlelight Memorial*, *The Global Fund*, *International Gay & Lesbian, Human Rights Commission* (IGLHRC), *The Global Alliance for LGBT Education* (GALE), AP Rainbow, *Talking About Reproductive & Sexual Health Issue* (TARSHI), Yogyakarta Principles, Proyek Cinta, Ashoka Indonesia, SexualityStudies.net, Q! Film Festival, *Stop AIDS Now*, Teman-Teman dan sebagai donatur adalah *Ford Foundation Hivos*. (www.gayanusantara.or.id, 2009)

Sejatinya banyak masyarakat Indonesia yang menjadi penganut LGBT, entah mereka sebagai lesbian, *gay*, biseksual, ataupun transgender. Terlepas dari apa yang mereka pilih dan orientasi apa yang mereka pilih, mereka merupakan satu kesatuan dalam dalam suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama.

d. Kapasitas Organisasi LGBT

Dalam catatan UNDP sendiri, pada tahun 2013 mencatat bahwa ada 119 organisasi LGBT di Indonesia dan tersebar diseluruh provinsi Indonesia. Pada 2015 organisasi LGBT di Indonesia bertambah menjadi sedikitnya 200 organisasi
GWL-INA merupakan organisasi Jaringan *Gay*, Waria

(Pria Transgender), yang didirikan pada bulan Februari 2007 dengan tujuan untuk melakukan pelayanan terhadap penanggulangan HIV dan PMS.

Karena keterbatasan ruang lingkup kinerja beberapa organisasi LGBT maka pada tahun 2008 organisasi-organisasi LGBT membuat forum LGBTIQ dengan tujuan untuk memajukan program hak-hak para penganut LGBTIQ dalam ruang lingkup yang lebih luas dan memperluas jaringan.

Forum ini mendapatkan dana yang cukup besar dari Hivos namun tidak terorganisir seperti yang Hivos berikan kepada GWL-INA. Pada pertemuan dialog nasional, koordinator forum menyatakan harapan untuk dapat memperoleh dukungan dari program UNDP “Hidup Sebagai LGBT di Asia”.

Beberapa organisasi memiliki anggota dengan beragam identitas gender, orientasi seksual, budaya, suku, dan agama. Sementara organisasi lainnya biasanya hanya berfokus kepada salah satu bagian dari LGBT, ada yang fokus kepada gay, ada yang hanya fokus kepada lesbian, dan ada yang fokus kepada transgender, serta fokus dalam program penyuluhan dan penanggulan HIV bagi gay dan transgender.

Di berbagai daerah yang belum memiliki komunitas atau pun organisasi membuat para penganut lesbian dan transgender menjadi lebih terintegrasi dan aktif di berbagai sektor, mereka tetap bisa berperan aktif dan berafiliasi dengan organisasi yang

ruang lingkungannya lebih luas, tidak hanya terpaku pada organisasi yang fokus pada isu seksual.

Organisasi yang sementara ada di Indonesia kebanyakan masih berada di daerah yang lebih padat, organisasi LGBT lebih banyak tersedia di pulau Jawa dan Sumatera, masih sedikit sekali organisasi-organisasi LGBT yang ada di pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian Timur. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan hadir organisasi-organisasi baru untuk memfasilitasi para penganut LGBT di Indonesia.

Tabel 1 Keberagaman Organisasi LGBT Indonesia

	LGB T	LBT p	GBT w	L	G	T p	T w	OL A	Tota l
Jumlah Organisa si	10	9	18	1	3 5	2	38	6	119

Sumber: UNDP

Akronim: + = kelompok pendukung ODHIV; OLA = Organisasi Layanan Penanggulangan AIDS (yang menyediakan program GBTw); B = biseksual; G = gay; GB = pria gay dan biseksual; L = lesbian; LB = wanita lesbian dan biseksual; T = transgender (pria dan wanita); Tp = pria transgender; Tw = wanita transgender.

e. Jumlah Penganut LGBT

Menurut survey CIA (*Central Intelligence Agency*) Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi penganut LGBT ke-5 terbesar didunia setelah Tiongkok, India, Eropa, dan Amerika. Hal ini merupakan konsekuensi dari besar dan padatnya jumlah penduduk Indonesia. Karena (menurut para peneliti) munculnya LGBT adalah secara alamiah, kecuali di Eropa dan Amerika yang didukung dengan keinginan para penganut LGBT di Eropa dan Amerika untuk mendapatkan kebebasan dalam segala hal, dan ditamnah dengan kebebasan media dalam menyiarkan hal-hal mengenai LGBT dan itu memicu perkembangan orientasi seksual dengan sangat cepat. (Qidal, 2015)

Dalam perhitungan melalui media sosial, dari Facebook saja sudah tercatat sebesar 6 juta pengguna Facebook di Indonesia termasuk penganut LGBT. Data itu baru berasal dari sosial media. Beberapa lembaga survey juga mencatat bahwa Indonesia memiliki sekitar 3% penganut LGBT, yang berarti dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia ada sekitar 7,5 juta penduduk Indonesia yang menganut LGBT. Para ilmuwan menyakini ada 10% populasi LGBT di seluruh dunia. Itu berarti ada 750 juta dari 7,5 milyar populasi manusia di seluruh dunia. Jumlah itu hampir 3 kali lipat penduduk Indonesia.

Sebagai masyarakat yang minoritas mereka tidak mampu mempertahankan apa yang mereka rasa dan perjuangkan, karena

kaum minoritas dituntut untuk mengikuti sesuai aturan mayoritas masyarakat yang memiliki kendali atas mereka sebagai kaum minoritas. (Scheffe, 2006) Mereka masih ragu untuk melakukan aktifitasnya didalam lingkungan kampus, jadi mereka menyediakan alternatif lain berupa sosial media, *chatting*, dan sarana komunikasi di dunia maya agar mereka tetap dapat tersambung satu dengan yang lainnya. (Andini, 2003) Karena sarana itu dianggap lebih aman bagi mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi agar informasi dapat cepat tersampaikan.

f. Kegiatan Organisasi

Beberapa organisasi selain berkecimpung dalam advokasi juga melakukan pekerjaan berupa menulis dan menerbitkan, baik itu menjadi sebuah buku, bulletin, majalah, halaman di sosial media, di web yang mereka punya. Dimana banyak orang dapat mengakses karya mereka.

Organisasi yang baru didirikan biasanya lebih cenderung mengenalkan, menjelaskan, memberi arti dan definisi mengenai LGBT menurut pandangan mereka. Mereka gencar melakukannya di dunia maya dan pertemuan di forum-forum diskusi di dunia maya.

Beberapa organisasi juga berupaya membina komunitas dan jaringan regional secara sistematis, seperti organisasi *gay* atau lesbian membantu memfasilitasi pembentukan organisasi *gay* atau lesbian lainnya. Pembekalan berupa edukasi yang berkaitan

dengan pengempangan komunitas dan kepengurusan organisasi, serta pengetahuan tentang identitas gender dan orientasi seksual.

Organisasi yang sudah besar juga menyediakan ruang yang aman bagi organisasi baru, memperkenalkan pada sekutu dan pemangku kepentingan, bahkan kadang-kadang membantu pembiayaan awal untuk pengembangan organisasi.

Organisasi LGBT yang sudah besar menyediakan ruang untuk dukungan antar organisasi baik yang sudah lama, berkembang, dan organisasi baru secara ekonomi dan psikosial. Dengan adanya pendanaan dari organisasi internasional organisasi yang sebelumnya hanya sebagai kelompok informal dapat berubah menjadi organisasi yang lebih formal, terstruktur dan membentuk hukum sebagai yayasan atau asosiasi.

Langkah pembentukan struktur organisasi formal yang bagus juga tidak luput dari bantuan yang diberikan, baik dari program penanggulangan HIV maupun hak asasi manusia untuk meningkatkan mutu manajemen organisasi.

Penganut LGBT, terutama lesbian, memiliki grup sekitar belasan sampai puluhan yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing grup memiliki tempat untuk berkumpul dan bertemu. Khusus di kalangan menengah keatas, perkumpulan mereka biasanya dilakukan di sejumlah bar atau tempat *hangout* di Jakarta. Biasanya mereka paling banyak di daerah Jakarta Selatan. Ada juga yang hanya berkumpul di rumah-rumah mereka. Kehidupan LGBT lekat sekali dengan alkohol, obat-

obatan terlarang, dan penyimpangan seks. Walau tidak semua para penganut LGBT melakukan hal seperti itu. Tanpa memandang isidentitas seksual mereka juga pasti ada dan pernah melakukan hal seperti itu.

Para penganut LGBT masih terus berusaha memperjuangkan haknya atas kesetaraan dan pengakuan atas adanya mereka di masyarakat karena mereka masih berada dalam situasi *In The Closet*. (Abraham, 2010) *In The Closet* merupakan gambaran hirarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow:

1. Fisik : udara, air, makanan, pakaian, seks, dan biologis lainnya
2. Keselamatan, kemandirian, rasa bebas ancaman dan ketakutan
3. Kebutuhan bermasyarakat, berkelompok sebagai anggota masyarakat
4. Kebutuhan penghormatan pribadi
5. Kebutuhan penghormatan atas pribadi dan kecukupan

g. Reaksi Penganut LGBT dan Masyarakat

Para penganut LGBT selalu menggunakan hak asasi manusia dan hak seksualitas mereka sebagai warga negara yang sah sebagai pelindungnya. Namun, mereka lupa bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan kebanyakan masyarakat Indonesia konservatif, mereka tidak akan sepakat dengan LGBT. Jika para penganut LGBT memiliki dan ingin menggunakan hak asasi manusia sebagai senjata yang mereka jual agar bisa diterima di masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia juga punya hak asasi manusia untuk menyelamatkan

generasi penerus dari LGBT, menyelamatkan dari perilaku dan kegiatan seks yang menyimpang, menyalahi nilai, norma, fitrah manusia, dan agama.

LGBT tidak mengenal jenis kelamin, batasan usia, status sosial maupun pekerjaan bahkan agama. LGBT bisa terjadi kepada siapa saja dan dimana saja. (Boykin, 2000) Banyak dikalangan masyarakat Indonesia yang tidak menerima fenomena ini, karena masyarakat menganggap hal ini sebagai sesuatu yang menyimpang, terlebih diterapkan didalam kehidupan sosial masyarakat. Ini merupakan *homophobia*, dimana masyarakat tidak dapat menerima fenomena LGBT.

Orientasi seksual dan perilaku yang menyimpang dari para penganut LGBT, berdampak pada pandangan masyarakat yang mereka memberi stigma buruk, hitam, dan dianggap sebagai penyakit sosial yang membahayakan. (Wardhanahendra, 2011)

Para penganut LGBT pun tidak jarang mengalami diskriminasi yang nyata, bahkan tak jarang mereka terasing dari keluarga dan lingkungannya. Indonesia misalnya, dimana merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Pancasila dan taat terhadap Undang-Undang, terdapat berbagai macam jenis agama, suku, budaya, ras menjadi satu bagian mencerminkan keistimewaan Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara sedang berkembang namun data menyebutkan bahwa di Indonesia banyak terdapat penganut LGBT.

Para penganut LGBT dan para sekutunya juga menuding masyarakat Indoensia yang menolak LGBT dan para penganutnya dianggap konservatif, begitu juga agama Islam, Kristen, dan Yahudi yang menolak LGBT di Indonesia. Jadi sebenarnya para penganut LGBT itu sendiri apakah beragama atau tidak, dan budaya mana yang mereka pilih.

Salah satu kitab psikologi yang dianggap suci oleh para penganut LGBT, buku tersebut berjudul *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* yang biasa dikenal menjadi buku DSM. Buku ini merupakan terbitan *American Psychiatric Association*. Buku DSM ini biasanya digunakan oleh para aktivis hak asasi manusia dan para penganut LGBT. Buku itu digunakan bagi para penganut LGBT dalam menguatkan pernyataan bahwa LGBT tidaklah menyimpang dan menguatkan tujuan mereka. Buku ini disusun oleh tujuh orang dan lima orang dari mereka merupakan penganut LGBT.

Penulis buku tersebut adalah Judith M Glassgold Psy yang juga merupakan ketua lesbian, ada Beverly Grene yang juga lesbian, lalu ada Jack Dreschers MD yang merupakan homoseksual, Clinton Anderson Ph.D juga seorang homoseksual, selanjutnya A Lee Beckstead Ph.D yang juga homoseksual, Robbin Lin Miler Ph.D yang merupakan biseksual, Roger L Worthington salah satu penulis buku DMS yang normal, tapi pernah mendapat *Catalist Award* dari LGBT Resource Centre. (Jong, www.thejakartapost.com, 2016)

Tidak hanya LGBT, tapi kelompok minoritas lainnya di Indonesia juga mendapatkan tindakan yang sewenang-wenang. Diskriminasi biasanya juga disertai dengan tindak kekerasan terhadap objek, tidak jarang juga para penganut LGBT dianggap manusia paling kotor yang tidak beragama, memberikan label manusia paling berdosa. Tentu saja ini memberikan dampak yang sangat besar kepada para penganut LGBT, mereka tidak akan mempunyai rasa nyaman dan aman berada di lingkungan masyarakat yang seperti itu. (ILC, 2009) Padahal rasa nyaman dan aman adalah hak asasi paling pokok dan dasar bagi manusia jika melihat gambaran hirarki tentang kebutuhan manusia dari Abraham Maslow.

Masalah LGBT memang tidak sederhana karena menyangkut banyak hal mengenai kehidupan seseorang. Silang pendapat mengenai LGBT juga akan selalu ada. Akan tetapi, munculnya pandangan dan suara-suara yang tidak produktif seputar LGBT, yang berasal dari lingkungan pendidikan dan kaum terdidik memang pantas disayangkan. Institusi pendidikan yang semestinya menjadi ruang berpikir, memberi apresiasi dan anti-diskriminasi, justru memiskinkan ketiga hal tersebut.

Telah terjadi beberapa peristiwa yang menyangkut para penganut LGBT di Yogyakarta. Kedua peristiwa ini bisa menjadi pelajaran dan refleksi berpikir bagi kita semua dalam memandang permasalahan LGBT. Peristiwa pertama terjadi pada Juli 2013 di Malioboro. Ketika itu ada karnaval budaya menuju halaman

depan Kantor Gubernur DIY. Dalam acara tersebut ada puluhan peserta yang tampil dengan mengenakan aksesoris dan membawa bendera atau kain berwarna pelangi yang selama ini identik dengan kaum LGBT. (Rappler, 2006)

Mereka juga mengusung poster-poster yang berisi ajakan untuk menghentikan diskriminasi dan bullying terhadap kaum LGBT. Di antara mereka terdapat beberapa warga asing yang turut serta. Tidak diketahui pasti apakah puluhan partisipan karnaval tersebut merupakan kaum LGBT atau hanya pegiat anti-diskriminasi dan anti-bullying yang juga peduli dengan masalah LGBT. Namun hal itu paling tidak menunjukkan bahwa Yogyakarta dan masyarakatnya memberikan ruang bagi perbedaan, termasuk bisa menerima mereka yang secara nyata menunjukkan orientasi yang berbeda.

Kedua adanya demonstrasi menolak diskriminasi terhadap kelompok LGBT dan minoritas sedianya digelar di kawasan Tugu, tetapi dihalangi oleh aparat dengan alasan 'tidak memberitahukan aksi ini kepada kepolisian'. Sementara di kawasan Tugu, yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi aksi SPD digelar demonstrasi yang diikuti Forum Umat Islam (FUI). Peserta aksi FUI mengatakan bahwa LGBT merupakan 'penyakit masyarakat dan menular, serta bertentangan dengan ajaran agama'. (Indonesia, 2016) Demonstrasi tersebut berakhir dengan ricuh, ada sedikitnya 12 orang terluka akibat demonstrasi tersebut.

Polisi yang ada terus mengawasi dan tidak membela (salah satu pihak). Polisi mencoba mengkoordinasikan keadaan. Namun banyak yang beranggapan bahwa selama ini aparat keamanan atau negara tampak tidak berdaya dalam menghadapi kelompok intoleran yang sejak dua tahun terakhir ini 'menghambat demokrasi dan mengancam kelompok minoritas termasuk LGBT'.

Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang identitas gender dan orientasi seksualitas melahirkan tindak kekerasan secara verbal maupun non verbal baik didunia nyata maupun dunia maya. Kekerasan tersebut diterima oleh para aktivis LGBT dan advokasi, tentu juga diterima oleh para penganut LGBT.

Tindak kekerasan pernah terjadi pada bulan Mei tahun 2012 saat ada pembahasan dan diskusi isi buku dari Irshad Manji yang berjudul "Allah, Liberty and Love" di Yogyakarta. Sejumlah organisasi msyarakat yang ada di Yogyakarta merusak dan melakukan pengusiran, serta pemberhentian acara diskusi tersebut. (Kompas, 2012)

Isi dari buku ini sebenarnya untuk mengkritisi kembali posisi konsep religiusitas untuk mengakomodir para penganut LGBT. Diskusi buku yang belum berjalan langsung dipaksa untuk dibatalkan dan gagal untuk dilaksanakan demi tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Ada kasus serupa yang terjadi juga masih di Yogyakarta, yaitu pembatalan diskusi tentang gender dan seksualitas yang diadakan di Universitas Gadjah Mada. Dengan alasan keamanan rector Universitas Gadjah Mada membatalkan diskusi tersebut.

Kasus diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman yang kurang soal gender dan seksualitas. Sedikit saja ada pembahasan tentang LGBT membuat masyarakat Indonesia seperti ingin berperang. Keadaan ini bisa disebabkan karena masyarakat Indonesia menciptakan didalam pemikirannya konsep baik dan buruk yang sudah tertanam dalam pola perilaku beragama, berbudaya dan sosial di lingkungan masyarakat Indonesia. (Tempo, 2012)

Tindakan represif ini bisa muncul karena bentuk pemahaman masyarakat Indonesia yang telah tertanam lama menerima pasangan heteroseksual adalah suatu kebenaran yang mutlak. Negara Indonesia yang secara kebijakan dan publik menghubungkan agama yang diakui dengan hubungan interaksi di lingkungan masyarakat hingga kedalam individu setiap masyarakat Indonesia.

Program pemerintah yaitu keluarga berencana yang disebarluaskan semakin menegaskan bahwa Indonesia tersusun dari masyarakat yang heteroseksual bukan homoseksual. Sehingga homoseksual dianggap sebuah penyakit, kelainan, dan penyimpangan yang bukan cerminan dari bangsa Indonesia.

Sikap homophobia dan pemikiran masyarakat Indonesia yang konservatif juga terbentuk dari budaya masyarakat Indonesia. Tindakan diskriminasi dalam masyarakat Indonesia tentu membuat penderitaan para penganut LGBT semakin bertambah dan semakin membuat posisi mereka semakin termajinalkan.

Adanya berbagai peristiwa yang terjadi di Yogyakarta mengenai LGBT membuat Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta meminta kepada pihak yang terlibat dalam demonstrasi mengenai LGBT dapat tenang dan tidak terpancing emosi. Sultan menghimbau adanya rasa saling menghormati dan menghargai baik dari kubu yang pro maupun yang kontra. (Tribunnews, 2016)

Sultan pun memandang diperlukan komunikasi yang baik antara pihak yang pro dengan pihak yang kontra LGBT untuk menghindari pertentangan yang memicu perpecahan. Menurut Sultan LGBT jangan mencolok dan proporsional saja. Sebab bagaimana pun mereka masih sama-sama anak bangsa Indonesia. Sehingga harus bisa saling menghargai.

Saat disinggung terkait sikapnya terhadap LGBT, Sultan mengaku akan menelaah permasalahan di balik penyimpangan orientasi seksual itu terlebih dulu. Untuk itu, Pemda DIY melalui Tim Penggerak (TP) PKK DIY membuat program penguatan keluarga dalam bentuk penguatan pola asuh, dan sebagainya. Program penguatan keluarga ini tidak hanya dapat mengindarkan

persoalan sosial seperti LGBT tadi. Namun juga mengatasi persoalan di bidang ketahanan pangan, pendidikan, atau kesehatan.

D. Yogyakarta Principles

Pada tahun 2006 ada dua buah lembaga internasional mengambil inisiatif menempuh langkah alternatif, yaitu menyaring hak-hak apa saja yang sudah melekat pada para penganut LGBT berdasarkan kovenan-kovenan internasional yang sudah menjadi dokumen resmi PBB, yaitu *The International Commission of Jurists* dan *The International Service for Human Rights*. Pada akhir 2006 tepatnya pada tanggal 6 sampai dengan 9 November 2006, terdapat 29 orang ahli hukum HAM Internasional yang berkumpul di Yogyakarta untuk mempersatukan dan merumuskan sekumpulan prinsip yang wajib dipatuhi oleh suatu Negara terkait dengan identitas gender dan orientasi seksual warga negaranya.

Terdapat total 29 prinsip yang telah disepakati bersama dengan nama *Yogyakarta Principles*. *Yogyakarta Principles* ini memang dokumen resmi dari PBB, namun dengan perkembangan masyarakat global dinilai sangat signifikan bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak para penganut LGBT di dunia. (Digilib Unila, 2012)

Dengan ini menandakan bahwa sangat penting bagi masyarakat global untuk memerangi diskriminasi yang berbasis

identitas gender dan orientasi seksual, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak para penganut LGBT di negara-negara yang belum menerima dan mengaplikasikan hak-hak LGBT. Dengan penuh semangat dan keyakinan untuk menghapus segala tindakan diskriminasi terhadap para penganut LGBT maka dirumuskan, disepakati, dan diadopsilah *Yogyakarta Principles* ini. (www.yogyakartaprinciple.org, 2005)

Prinsip-prinsip ini mengenai hak-hak kaum LGBT untuk memilih pilihan orientasi dan identitas gender LGBT. Adapun isi prinsip-prinsip yogyakarta yaitu:

Prinsip 1: Hak untuk penikmatan hak asasi manusia secara luas

Prinsip 2: Hak atas kesetaraan dan non diskriminasi

Prinsip 3: Hak atas pengakuan di mata hukum

Prinsip 4: Hak untuk hidup

Prinsip 5: Hak atas keamanan seseorang

Prinsip 6: Hak atas privasi

Prinsip 7: Hak atas kebebasan dan kesewenang-wenangan

terhadap perampasan Prinsip 8: Hak atas pengadilan yang adil

Prinsip 9: Hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi selama dalam tahanan

Prinsip 10: Hak atas kebebasan dari siksaan dan kekejaman, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan.

- Prinsip 11: Hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi, penjualan, dan perdagangan manusia
- Prinsip 12: Hak untuk bekerja
- Prinsip 13: Hak atas keamanan sosial dan atas tindakan perlindungan sosial lainnya.
- Prinsip 14: Hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak
- Prinsip 15: Hak atas perumahan yang layak
- Prinsip 16: Hak atas pendidikan
- Prinsip 17: Hak atas pencapaian tertinggi standar pendidikan
- Prinsip 18: Hak perlindungan atas kekerasan medis
- Prinsip 19: Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi
- Prinsip 20: Hak atas kebebasan berkumpul dengan damai dan berasosiasi
- Prinsip 21: Hak atas kebebasan berfikir, memiliki kesadaran dan agama
- Prinsip 22: Hak atas kebebasan untuk berpindah
- Prinsip 23: Hak untuk mencari perlindungan
- Prinsip 24: Hak untuk menemukan keluarga
- Prinsip 25: Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik
- Prinsip 26: Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya
- Prinsip 27: Hak untuk memajukan HAM
- Prinsip 28: Hak atas pemulihan dan ganti rugi yang efektif
- Prinsip 29: Akuntabilitas

E. Sentimen Anti LGBT

Dalam konteks Indonesia, upaya untuk melawan advokasi LGBT adalah dengan melawan kampanye-kampanye LGBT dengan kampanye-kampanye, sedangkan media dilawan dengan media secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai contoh perlu adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti LGBT, wartawan yang memberitakan tentang perlawanan LGBT, penulis yang menulis tentang bahaya LGBT, dan cendekiawan baik itu ilmuwan maupun tokoh agama yang melakukan diskusi publik tentang anti LGBT sehingga mampu mempengaruhi opini publik.

Melalui bidangnya masing-masing, kaum intelektual organis bisa langsung menyentuh masyarakat/kelas yang terdominasi untuk memberikan edukasi kesadaran terhadap sesuatu yang sedang dialami dan melawan suatu hegemoni demi tercapainya kepentingan kelompok masyarakat/kelas tersebut.

Di awal-awal bulan pada tahun 2016 sempat terjadi kehebohan nasional mengenai kelompok LGBT, para penganut LGBT dianjurkan untuk melakukan terapi dan rehabilitasi, dengan mengesampingkan bukti-bukti ilmiah bahwa terapi dan rehabilitasi semacam itu tidak berfungsi dan telah terbukti merupakan sebuah praktik yang berbahaya dengan konsekuensi jangka panjang. (Albania, 2016)

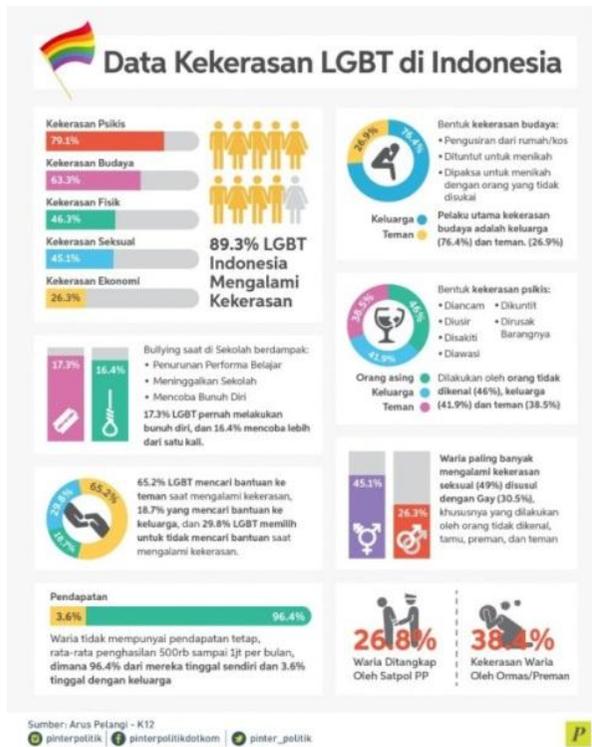
Menteri Sosial Indonesia, Khofifah Indar Parawansa mempromosikan metode *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ)

agar para penganut LGBT dapat kembali seperti masyarakat pada umumnya. (Tempo A. , 2016)

Desakan untuk menerapkan terapi dan rehabilitasi terus berlanjut sepanjang tahun 2016 hingga pada bulan Agustus 2016. Sebuah Undang-undang anti LGBTIQ diajukan oleh anggota Dewan dari partai-partai konservatif. (Dewi, 2016) Jika undang-undang tersebut berhasil lolos, Indonesia akan bergabung bersama negara-negara lain di dunia yang menganut hukum kolonial Inggris yang mengkriminalisasi hubungan seks sesama sejenis.

Sebuah survei dilakukan dengan hasil dikatakan bahwa kelompok LGBT dan para penganutnya merupakan kelompok yang paling dibenci atau paling tidak disenangi di Indonesia, bahkan lebih dibenci daripada komunis. (Jong, 2016)

Gambar 1 Data Kekerasan LGBT di Indonesia 2017



Sumber: Arus Pelangi

Pada tahun 2016 Aliansi Cinta Keluarga mengajukan sebuah petisi kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peninjauan kembali beberapa pasal dalam KUHP yang jika disetujui oleh Mahkamah Konstitusi dapat menghukum seseorang yang melakukan kegiatan seks atas dasar suka sama suka tanpa paksaan bagi orang dewasa diluar perkawinan. (Jong, www.thejakartapost.com, 2016)

Dengan pasal tersebut berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena akan mengancam zona hak atas perlindungan pribadi, privasi, dan hak diskriminasi akan terancam. Namun Mahkamah belum memberikan keputusan terhadap pasal tersebut. Para pemohon petisi menginginkan pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang lebih jelas bahwa siapa pun yang melakukan kegiatan seks bebas merupakan perzinahan harus dihukum karena tidak sesuai dengan norma dan budaya Indonesia.

Para pemohon petisi meminta untuk mengubah istilah ‘dibawah umur’ dan ‘dewasa’ pada Pasal 292 menjadi ‘barang siapa’. Mereka juga meminta Pasal 284 untuk dibatalkan mengenai hubungan seks bagi siapa pun yang sudah menikah. Yang terakhir Pasal 285 mengenai pemerkosaan yang merupakan sebuah upaya untuk menganggap setiap hubungan seks bagi orang-orang yang belum menikah merupakan tindakan kriminalisasi, serta pemerkosaan pasti terdapat tindak kekerasan seksual baik itu dilakukan oleh wanita maupun pria. (Jong, www.thejakartapost.com, 2016)

Hasil keputusan Mahkamah akan sangat mempengaruhi kebijakan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap para pelaku kegiatan seks. Oleh karena itu adanya gerakan sosial dinilai ampuh untuk menekan LGBT jika seluruh lapisan masyarakat Indonesia melakukan gerakan anti LGBT ini dimulai dari rumah tangga, keluarga, lingkungan, masyarakat, organisasi-

organisasi, lembaga-lembaga, dan pemerintah. (Mandiri, 2016). Advokasi legalisasi LGBT pun mendapat reaksi dari pemerintah melalui Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu yang menegaskan bahwa “perilaku menyimpang LGBT ini merupakan propaganda perubahan pola pikir”. Ini akan sangat berbahaya jika propaganda yang dilakukan semakin gencar dan berkembang pesat. (Dalimunthe, 2016).

Dalam konteks ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menyediakan wadah bagi para penganut LGBT agar mereka mendapatkan bimbingan dan konsultasi hingga mereka kembali normal seperti masyarakat pada umumnya. Seperti LSM atau kelompok yang memang fokus terhadap anti LGBT untuk membuat para penganut LGBT sadar bahwaitu merupakan hal kelirudan salah.

Perlu kerjasama yang sinergis dari semua lapisan untuk membantu para penganut LGBT kembali pada jalan hidup yang normal. Para penganut LGBT sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam proses penyembuhannya. Pendekatan secara pribadi seperti melibatkan mantan penganut LGBT untuk membantu menyadarkan para penganut LGBT dapat menjadi alternatif agar proses penyembuhan dan penyadaran berjalan dengan baik.

Diperlukan juga usaha dan upaya untuk melawan hegemoni advokasi legalisasi LGBT di Indonesia yang merupakan salah satu agenda internasional. Usaha pertama yang

dilakukan ialah mengumpulkan dan memunculkan intelektual organis yang mampu memberikan sanggahan dan penolakan terhadap argumen yang berikan oleh para aktivis LGBT.

Kedua, memberikan edukasi kepada para penganut LGBT untuk kembali normal melalui intelektual organis sehingga muncul *catharsis* terhadap hegemoni. Tentunya hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan, perlu kecerdasan dan kerja keras untuk mewujudkannya.

Dalam beberapa dekade belakangan ini timbul permasalahan besar bagi para penganut LGBT, seperti yang sudah dijelaskan diatas tindakan penyerangan, pengerusakan dan pemberhentian suatu acara yang dimana dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat. Banyak dari pelaku tindakan diskriminasi tersebut dilakukan oleh para penganut Islamis yang militant. Para aktivis pun tidak dapat berbuat banyak, mereka tidak percaya bahwa pihak berwajib akan melindungi mereka dari hal-hal seperti itu tapi nyatanya teteap saja terjadi. Sentimen anti LGBT membuat pergejolakan kehidupan masyarakat Indonesia dan membuat was-was para penganut LGBT untuk tetap dapat hidup layaknya masyarakat biasa, mereka tak lagi berani untuk dapat tampil terbuka dan terang-terangan ke publik agar mereka tetap aman.

Ada beberapa kelompok-kelompok dan organisasi baik organisasi non pemerintah maupun organisasi keagamaan yang menyerukan gerakan anti LGBT di Indonesia. Mereka

menyerukan bahwa LGBT merupakan propaganda yang dilakukan demi suatu kepentingan terhadap Indonesia. Para psikiater di Indonesia juga menyatakan bahwa LGBT merupakan penyakit kejiwaan. Organisasi Muslim di Indonesia bahkan juga menyerukan bahwa tindakan diskriminasi terhadap para penganut dan perilaku LGBT diperbolehkan dan memaksa para penganut LGBT untuk rehabilitasi agar dapat kembali menjadi manusia normal pada umumnya.

Pada awal tahun 2016 *Human Right Watch* mencatat bahwa tahun 2016 merupakan tahun dimana gerakan anti LGBT ini mencuat naik, laporan tindak kekerasan terjadi dimana-mana, baik secara individu, kelompok, komunitas, maupun organisasi. Akibat tindakan diskriminasi ini menyebabkan hubungan dan interkasi antar masyarakat menjadi renggang.